Saat Demokrasi Menjadi Kosmetik Kekuasaan



Oleh
Irham Ihsan, S.H., M.Si
Ketua Sompung Lolona Cenrana

Indonesia telah menempuh perjalanan politik yang panjang: dari era kerajaan, masa kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi. Namun di tengah seluruh perubahan itu, satu pertanyaan mendasar belum benar-benar terjawab: apakah demokrasi sungguh menghadirkan kedaulatan rakyat, atau sekadar menjadi wajah baru dari kekuasaan lama yang berganti kostum?

Reformasi 1998 memang membuka ruang kebebasan yang lebih luas. Pers dibebaskan, partisipasi politik diperluas, dan berbagai lembaga pengawas dibentuk. Akan tetapi, lebih dari dua dekade kemudian, demokrasi Indonesia justru menghadapi paradoksnya sendiri: prosedur demokrasi tumbuh, tetapi substansi demokrasi perlahan menipis. Pemilu berlangsung rutin, lembaga negara bertambah banyak, dan jargon “atas nama rakyat” terus dikumandangkan. Namun di balik seluruh kemeriahan itu, kekuasaan tetap berputar di lingkaran elite yang sama—lebih modern, lebih halus, tetapi sering kali tidak lebih berpihak kepada rakyat.

Pada masa kerajaan, kekuasaan memang diwariskan melalui garis keturunan dan dikendalikan elite istana. Namun tidak semua tradisi politik Nusantara bersifat mutlak dan sewenang-wenang. Di Kerajaan Bone, misalnya, dikenal mekanisme musyawarah dan keberadaan dewan adat Ade PituE yang memiliki kewenangan moral untuk menegur bahkan mencopot penguasa yang dianggap zalim. Tradisi ini menunjukkan bahwa gagasan tentang pengawasan kekuasaan sesungguhnya telah hidup dalam kebudayaan lokal jauh sebelum demokrasi modern diperkenalkan.

Ironisnya, ketika negara modern tumbuh, banyak mekanisme kontrol sosial semacam itu justru melemah. Nilai musyawarah bergeser menjadi transaksi politik, sementara hubungan patronase lama bertransformasi ke dalam wajah baru kekuasaan modern: partai politik, oligarki ekonomi, dan pengaruh modal.

Pasca kemerdekaan, Indonesia sebenarnya memiliki peluang besar membangun sistem politik yang adil dan partisipatif. Demokrasi parlementer pernah dicoba, lalu bergeser menjadi demokrasi terpimpin, kemudian Demokrasi Pancasila, hingga akhirnya memasuki era Reformasi. Namun perubahan sistem tidak selalu diikuti perubahan watak kekuasaan. Sejarah politik Indonesia berkali-kali memperlihatkan bahwa bentuk pemerintahan dapat berubah, tetapi hasrat untuk memusatkan kuasa sering tetap bertahan.

Orde Lama meninggalkan pelajaran tentang bahaya konsentrasi kekuasaan yang melemahkan kontrol publik. Orde Baru menghadirkan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi, tetapi dibayar mahal dengan pembungkaman kritik, sentralisasi kekuasaan, dan matinya kebebasan sipil. Reformasi 1998 kemudian lahir sebagai harapan besar untuk mengakhiri warisan otoritarianisme itu. Akan tetapi, reformasi politik ternyata tidak otomatis melahirkan demokrasi yang sehat. Yang berubah sering kali hanya mekanismenya, sementara pola dominasi tetap bertahan dalam bentuk yang lebih prosedural dan lebih rapi.

Hari ini Indonesia memiliki pemilu reguler, media yang beragam, dan lembaga demokrasi yang tampak lengkap. Namun berbagai indikator menunjukkan bahwa kualitas demokrasi justru mengalami kemunduran. Freedom House dalam beberapa tahun terakhir menempatkan Indonesia dalam kategori *partly free*, sementara V-Dem mencatat penurunan kualitas demokrasi sejak akhir 2010-an. Fakta ini menunjukkan bahwa demokrasi tidak cukup diukur dari ada atau

tidaknya pemilu, melainkan dari sejauh mana rakyat benar-benar memiliki kekuasaan untuk menentukan arah negara.

Persoalan terbesar demokrasi Indonesia hari ini adalah menguatnya oligarki politik dan ekonomi. Politik uang semakin dianggap lazim, partai-partai kehilangan orientasi ideologis, dan jabatan publik kerap diperlakukan sebagai investasi kekuasaan. Dalam banyak pemilu, suara rakyat tidak lagi dipandang sebagai amanah politik, melainkan sebagai komoditas yang dapat dibeli dan dipertukarkan.

Korupsi pun tidak lagi hadir sebagai penyimpangan individual semata, melainkan telah berkembang menjadi ancaman sistemik. Berbagai kasus besar mulai dari proyek infrastruktur, dana bantuan sosial, hingga pengadaan alat kesehatan menunjukkan bahwa kekuasaan terlalu sering dipakai untuk melayani kepentingan kelompok, bukan kepentingan rakyat. Pada saat yang sama, hubungan antara elite politik dan pemilik modal semakin sulit dipisahkan. Media, kebijakan, bahkan arah percakapan publik acap kali ditentukan oleh kepentingan ekonomi yang terkonsentrasi pada segelintir kelompok.

Akibatnya, demokrasi berjalan lebih sebagai pertunjukan procedural daripada ruang kedaulatan rakyat yang sejati. Rakyat hadir saat pemilu, tetapi sering absen dalam pengambilan keputusan. Aspirasi publik didengar, tetapi tidak selalu dipertimbangkan. Kritik diterima secara formal, tetapi kerap kehilangan daya pengaruh terhadap kebijakan.

Inilah ironi terbesar demokrasi Indonesia. Kekuasaan memang tidak lagi diwariskan berdasarkan darah dan keturunan seperti pada masa kerajaan. Namun dalam praktiknya, lingkaran kekuasaan tetap dikuasai kelompok terbatas hanya dengan wajah yang lebih modern, bahasa yang lebih sopan, dan legitimasi yang dibungkus melalui pemilu. Demokrasi akhirnya berisiko berubah menjadi sekadar kosmetik kekuasaan: tampak indah dalam pidato dan simbol-simbol kenegaraan, tetapi kosong dalam kenyataan sosial.

Padahal bangsa ini memiliki warisan moral yang kaya tentang makna kepemimpinan. Soekarno berkali-kali menegaskan bahwa kedaulatan rakyat tidak boleh berhenti sebagai slogan politik. Mohammad Hatta mengingatkan bahwa demokrasi harus bertumpu pada partisipasi rakyat dan keadilan ekonomi. Dalam tradisi Bugis, pemimpin dipandang bukan sebagai pemilik kekuasaan, melainkan pemegang amanah yang wajib ditegur ketika menyimpang. Sementara dalam perspektif Islam, kekuasaan adalah tanggung jawab moral yang kelak dipertanggungjawabkan, bukan hak istimewa untuk memperkaya diri dan kelompok.

Karena itu, Indonesia tidak cukup hanya membutuhkan pergantian pejabat atau reformasi administratif semata. Yang jauh lebih mendesak adalah restorasi moral dan pembenahan kelembagaan secara serius. Demokrasi harus dikembalikan pada ruh dasarnya: kejujuran, keadilan, musyawarah, keberanian moral, dan keberpihakan kepada rakyat.

Tanpa itu semua, demokrasi hanya akan menjadi panggung megah yang dipenuhi pidato tentang rakyat, tetapi miskin keberanian untuk membela mereka. Dan ketika demokrasi kehilangan moralitasnya, ia perlahan berubah bukan menjadi jalan pembebasan, melainkan alat untuk melanggengkan kekuasaan.

Bawaslu Kab. Bone